

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Chtistine ST Kansil. 1997. *Modul hukum administrasi negara C.S.T Kansil & Christine S.T Kansil*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Fathoni, Abdulrahmat. 2006. *Managemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka Cipta.

Herman Hermit. 2009. *Komentar Atas Undang-Undang Perumahan dan Permukiman (UU No. 4 Tahun 1992)*. Bandung: CV Mandar Maju.

Iskandar. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*, cet Ke-1. Jakarta: Gaung Persada

Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refloka Aditama.

Prajudi Atmosudirdjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Yudishtira.

Pudyatmiko, Y. Sri. 2009. *Perizinan – Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta : Grasindo

Ridwan HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press, Jakarta.

Saiful Anwar. 2004. *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*. Jakarta:Gloria Madani Press.

Sujanto. 2006. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sutedi, Adrian. 2010. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir.1993. *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*. Jakarta: Rineke Cipta.

Jurnal:

Agung Syarifudin.2016. “*Pengawasan terhadap Perizinan Pembangunan Perumahan dengan Hunian Berimbang di Kota Bandung dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan (Welfare State)*”. Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Amirudin Rohmat. 2010. “*Pelaksanaan Pengaturan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Implikasinya Terhadap Tataruang Di Kabupaten Batang*”. Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dea Funawa Punkai. 2018. “*Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Terhadap Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan*”. Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Fauzani Rharja, Ivan. 2014. *Penegakan Hukum Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Perizinan*. Jakarta.

Marintan Yosefin Napitupulu, *Jurnal Penerapan Prinsip Good Governance Dan Pengaruhnya Terhadap Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah Studi pada Penyusunan RTRW Kabupaten Serdang Bedagai, Vol-19.No 4, 2016, hlm. 196-197.*

Muhibbin Moh, Sunardi. 2022. *Aspek Hukum Perizinan Pemanfaatan Ruang Dalam Pembangunan Perumahan dan Pemukiman*. Malang.

Rozan Haryadi, Sayyid. 2019. *Hukum Perizinan Dalam Hukum Administrasi Negara*. Jakarta.

Zuliah Asmiati, Mhd. Asri Pulungan. 2020. *Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta

Website Online:

https://www.researchgate.net/profile/EdwiaPutri/publication/336879586_PERIZINAN_DALAM_HUKUM_ADMINISTRASI_NEGARA/links/5db867dd4585151435d15dbe/PERIZINAN-DALAM-HUKUM-ADMINISTRASI-NEGARA. Diakses pada tanggal 28 Juni 2023.

<https://www.99.com/blog/indonesia/izin-developer-rumah/>, diakses pada 21 Maret 2022.

https://www.academia.edu/32364215/Makalah_Hukum_Administrasi_Negara_Tentang_Hukum_Perizinan. Diakses pada tanggal 28 Juni 2023

Yudha Prayoga, Perizinan dalam hukum administrasi Negara, <http://prayogayudha.blogspot.com/2013/11/perizinan-dalam-hukum-administrasi.html>. Diakses pada tanggal 3 Juli 2023

Peraturan:

Peraturan Bupati Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Pemukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta: Prenada Media Group, 2010

Wawancara:

Wawancara dengan Bapak Antonius Lori, ST,.M.M selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nagekeo

Wawancara dengan Bapak Marselinus Djawa selaku calon penerima bantuan perumahan

Wawancara dengan Bapak Petrus Ea Seda, ST selaku Tenaga Fasilitator Lapangan

Dokumentasi:

Dokumentasi Sistem Informasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Mbay



LAMPIRAN



Sumber: Dokumentasi Lapangan



Sumber: Dokumentasi Lapangan



Sumber: Dokumentasi Lapangan



Sumber: Dokumentasi Lapangan



Sumber: Dokumentasi Lapangan



Sumber: Dokumentasi Lapangan



Sumber: Dokumentasi Lapangan



Sumber: Dokumentasi Lapangan



Sumber: Dokumentasi Lapangan



Sumber: Dokumentasi Lapangan



Sumber: Dokumentasi Lapangan



Sumber: Penulis Bersama Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
Kabupaten Nagekeo Bapak Antonius Lori, St.M.M
(Informan Kunci)



Sumber: Penulis Bersama Calon Penerima Bantuan Perumahan Subsidi Bapak Marselinus
Djawa
(Informan Pendukung)



Sumber: Penulis Bersama Tenaga Fasilitator Lapangan Bapak Petrus Ea Seda
(Informan Pendukung)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGEKEO
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
JLN. DEWI SARTIKA
MBAY

Mbay, 4 Oktober 2022

Kepada

Nomor : 648 /DPR-KP/ 50.a/10/2022

Yth Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik

Lampiran : -

Perihal : Perizinan Penelitian a.n.

Universitas Nasional

Guido Calviano B. B. Ko'o

di

Tempat.

Yang Bertanda Tangan dibawah ini ;

Nama : Lory Antonius, S.T., M.T.

N i p. : 19630404 199903 1 003

Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Alamat : Jln. Dewi Sartika – Mbay

Dengan ini menerangkan bahwa ;

Nama : Guido Calviano Bonnefacio Bay Ko'o

N i m. : 163112351550053

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Administrasi Publik

Universitas : Nasional

Alamat : Jln. Sawo Manila, Pejaten PS. Minggu Jakarta.

Kode Pos : 12520

Yang bersangkutan telah melakukan Penelitian di Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Nagekeo terhitung sejak tanggal 3 Juli 2022 s.d. 3 Oktober 2022 guna penulisan skripsi dengan judul : Upaya Dinas Perumahan Rakyat Dalam Pengawasan Perizinan dan Bantuan Subsidi Perumahan (Studi Kasus Pada Dinas Perumahan Raykat Kota Mbay Kabupaten Nagekeo Flores Nusa Tenggara Timur);

Demikian keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Nagekeo,



Lory Antonius, S.T., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19630404 199903 1 003



PANDUAN WAWANCARA

UPAYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DALAM PENGAWASAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BANTUAN SUBSIDI DI KABUPATEN NAGEKEO

A. Identitas Narasumber Kepala Dinas Kabupaten Nagekeo

No.	Uraian	Keterangan
1.	Nama	Bapak Antonius Lori, St.M.M
2.	Alamat	Aeramo, Mbay, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo
3.	No.HP	62 81353558997
4.	Instansi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5.	Jabatan /Lama Bekerja	Kepala Dinas/4 Tahun
6.	Jenis Kelamin	Pria
7.	Pendidikan Terakhir	Magister

B. Sistem Pengawasan Perizinan Perumahan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nagekeo

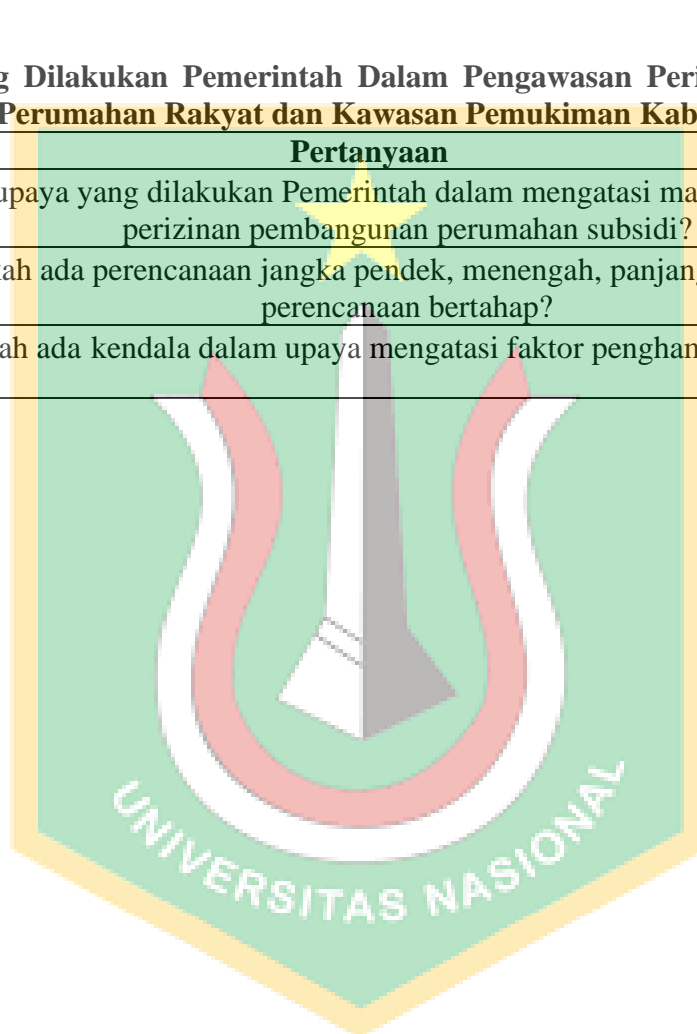
No.	Pertanyaan
1	Apa tujuan dari pengawasan perizinan pembangunan perumahan subsidi?
2	Bagaimana prosedur pengawasan perizinan pembangunan perumahan subsidi ?
3	Adakah Undang-Undang yang mengatur pengawasan perizinan pembangunan perumahan subsidi?
4	Bagaimana cara yang tepat dan efisien untuk pengawasan perizinan pembangunan perumahan subsidi?
5	Apa saja syarat dari perizinan pembangunan perumahan subsidi?

C. Faktor-Faktor Yang Menghambat Upaya Pemerintah Dalam Pengawasan Perizinan Perumahan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nagekeo

No.	Pertanyaan
1	Apa saja faktor yang menghambat pengawasan perizinan pembangunan perumahan subsidi?
2	Apa yang menjadi masalah utama dalam pengawasan perizinan pembangunan perumahan subsidi?

D. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Pengawasan Perizinan Perumahan Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nagekeo

No.	Pertanyaan
1	Apakah upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi masalah pengawasan perizinan pembangunan perumahan subsidi?
2	Apakah ada perencanaan jangka pendek, menengah, panjang dalam upaya perencanaan bertahap?
3	Apakah ada kendala dalam upaya mengatasi faktor penghambat yang ada?





PANDUAN WAWANCARA

UPAYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DALAM PENGAWASAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BANTUAN SUBSIDI DI KABUPATEN NAGEKEO

A. Identitas Narasumber Kepala Dinas Kabupaten Nagekeo

No.	Uraian	Keterangan
1.	Nama	Bapak Antonius Lori, St.M.M
2.	Alamat	Aeramo, Mbay, Kec. Aesesa, Kab. Nagekeo
3.	No.HP	62 81353558997
4.	Instansi	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
5.	Jabatan /Lama Bekerja	Kepala Dinas/4 Tahun
6.	Jenis Kelamin	Pria
7.	Pendidikan Terakhir	Magister

A. Sistem Pengawasan Perizinan Perumahan Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Nagekeo

	Pertanyaan	Jawaban
	Apa tujuan dari pengawasan perizinan pembangunan perumahan subsidi?	Tujuan dari pengawasa perizinan pembangunan perumahan subsidi ini adalah untuk membantu membimbing dan memberikan edukasi kepada masyarakat calon penerima bantuan agar proses perizinan dapat berjalan lebih efisien.
	Bagaimana prosedur pengawasan perizinan pembangunan perumahan subsidi ?	Setelah mendapatkan nama calon penerima bantuan maka TFL akan melakukan pemetaan untuk mendata jumlah calon penerima dan pengecekan terhadap rumah calon penerima untuk mengetahui

		apakah calon penerima memenuhi persyaratan sebagai calon penerima bantuan perumahan subsidi sehingga selanjutnya dapat dilakukan pengurusan SK Bupati terhadap pelaksanaan pembangunan perumahan subsidi tersebut.
	Adakah Undang-Undang yang mengatur pengawasan perizinan pembangunan perumahan subsidi?	Adapun untuk system pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman ini kami dipercayakan oleh Bupati berdasarkan Peraturan Bupati Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Tatakerja Dinas sehingga dipercayakan Dinas ini untuk mengelola bantuan perumahan dan kami memberikan bantuan ini sesuai yang dipercayakan Bupati kepada kami
	Apa saja faktor yang menghambat pengawasan perizinan pembangunan perumahan subsidi?	Umumnya masalah yang sering menjadi penghambat adalah masalah kepemilikan tanah dari dalam internal calon penerima bantuan itu sendiri yang belum jelas kepemilikannya.
	Apakah upaya yang dilakukan Pemerintah dalam mengatasi masalah pengawasan perizinan pembangunan perumahan subsidi?	Saya ambil contoh kasus jika suatu tanah adalah tanah warisan yang diwariskan kepada salah satu anaknya. Maka setiap saudara Bersama anak tersebut akan melakukan diskusi yang kami sebut "Babho" untuk memberikan kepemilikan tanah kepada calon penerima bantuan sehingga pada saat pembangunan tidak ada masalah yang berkaitan dengan kepemilikan tanah.

UPAYA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN DALAM PENGAWASAN PERIZINAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN BANTUAN SUBSIDI DI KABUPATEN NAGEKEO FLORES NUSA TENGGARA TIMUR

ORIGINALITY REPORT

28%

SIMILARITY INDEX

29%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

16%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinjambi.ac.id Internet Source	6%
2	core.ac.uk Internet Source	2%
3	www.scribd.com Internet Source	1%
4	p2k.stekom.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
6	adoc.tips Internet Source	1%
7	Submitted to Fakultas Hukum Universitas Lampung Student Paper	1%

repository.ub.ac.id

8	Internet Source	1 %
9	nagekeokab.bps.go.id Internet Source	1 %
10	www.docdroid.net Internet Source	1 %
11	www.nttprov.go.id Internet Source	1 %
12	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
13	dokumen.tips Internet Source	1 %
14	id.m.wikipedia.org Internet Source	1 %
15	sintang.go.id Internet Source	1 %
16	nurmaya01.blogspot.com Internet Source	1 %
17	ppid.sintang.go.id Internet Source	1 %
18	dspace.uii.ac.id Internet Source	1 %
19	jasindopt.com Internet Source	1 %



20	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
21	biroorganisasintt.org Internet Source	<1 %
22	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
23	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
24	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1 %
25	repository.ut.ac.id Internet Source	<1 %
26	repository.umj.ac.id Internet Source	<1 %
27	mitrakab.go.id Internet Source	<1 %
28	perkimtaru.tegalkab.go.id Internet Source	<1 %
29	repository.unwira.ac.id Internet Source	<1 %
30	Submitted to Universitas Kristen Duta Wacana Student Paper	<1 %
31	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	<1 %



32	dkk.balikpapan.go.id Internet Source	<1 %
33	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
34	docplayer.info Internet Source	<1 %
35	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	<1 %
36	Submitted to Universitas Jember Student Paper	<1 %
37	dpkpp.bogorkab.go.id Internet Source	<1 %
38	idoc.pub Internet Source	<1 %
39	id.123dok.com Internet Source	<1 %
40	id.scribd.com Internet Source	<1 %
41	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
42	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1 %
43	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %



44 repository.unibos.ac.id

Internet Source

<1 %

45 epub.imandiri.id

Internet Source

<1 %

46 esakip.tasikmalayakota.go.id

Internet Source

<1 %

47 repositori.utu.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes On

Exclude bibliography On

Exclude matches < 17 words

